

**Strategi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam)  
Terhadap Kinerja Kepala Kampung Waruwe****Oleh:****<sup>1</sup> Paul Adryani Moento; <sup>2</sup> Welhelmina Jeujanan; <sup>3</sup> Dandi Saleky**1,2, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Musamus3. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas  
MusamusEmail . [paulmoento@unmus.ac.id](mailto:paulmoento@unmus.ac.id)**Abstract**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Strategi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) terhadap Kinerja Kepala Kampung Waruwe. Untuk mendapatkan data penelitian, Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Strategi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) terhadap Kinerja Kepala Kampung Waruwe dilakukan dengan Strategi sebagai sebuah rencana yaitu Bamuskam melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek prioritas yang perlu diawasi, termasuk penggunaan anggaran Kampung, pelaksanaan program pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Selanjutnya strategi sebagai sebuah posisi, Strategi yang diterapkan oleh Bamuskam dalam menempatkan diri sebagai pengawas utama dalam pemerintahan kampung didasarkan pada berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan kampung. Bamuskam memperkuat kedudukannya sebagai lembaga pengawas dengan merujuk pada regulasi dan undang-undang yang secara resmi memberikan kewenangan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kampung. Salah satu sudut pandang utama yang diadopsi oleh Bamuskam adalah menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemerintahan kampung. Bamuskam mendorong partisipasi aktif warga dalam mengevaluasi kebijakan kampung agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah kampung dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Bamuskam masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan, kurangnya transparansi dari pemerintah kampung, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Anak Putus Sekolah, Dinas Sosial

---

**Abstrac**

*The purpose of this research is to determine the Supervision Strategy of the Village Consultative Body (Bamuskam) on the Performance of the Head of Waruwe Village. Data analysis was carried out using a descriptive method. This study employs a qualitative approach, while the data analysis technique follows three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research article indicate the Supervision Strategy of the Village Consultative Body (Bamuskam) on the Performance of the Head of Waruwe Village is implemented through strategic planning. Bamuskam identifies priority aspects that need supervision, including village budget utilization, development program implementation, and community involvement in every policy decision. Furthermore, as a positioning strategy, Bamuskam establishes itself as the primary oversight body in village governance through various strategic steps aimed at ensuring transparency and accountability. Bamuskam strengthens its role as a supervisory institution by referring to regulations and laws that officially grant it the authority to oversee the administration of village governance. As a perspective strategy, one of the main viewpoints adopted by Bamuskam is positioning the community as a strategic partner in village governance oversight. Bamuskam encourages active citizen participation in evaluating village policies to ensure that every decision made by the village government reflects the aspirations and needs of the community. Bamuskam still faces various challenges, including the lack of public understanding of the importance of supervision, the lack of transparency from the village government, and limited available resources.*

*Keywords: Strategy, Supervision, Bamuskam.*

---

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menerapkan sistem yang dikenal sebagai desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas tata kelola (muhammad idris patarai, 2017), dengan mempertimbangkan luasnya wilayah di seluruh negeri (Maranjaya, 2022). Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, sehingga mereka dapat mengatur, mengelola, dan mengurus pemerintahan di wilayahnya secara mandiri. Pemerintah pusat akan menghadapi berbagai kendala jika harus mengatur seluruh aspek pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, desentralisasi atau yang dikenal sebagai otonomi daerah diterapkan untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Melalui sistem ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di wilayahnya secara mandiri, yang sering disebut dengan mengurus "urusan rumah tangga" sendiri (Masnun, 2024).

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik. Namun, ada beberapa aspek yang tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, seperti kebijakan luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional, urusan keagamaan, serta kebijakan moneter dan fiskal baik secara nasional maupun internasional (Nuradhwati, 2019). Ketentuan mengenai pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten/kota, distrik, serta desa atau kampung. Khusus mengenai desa atau kampung, pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, istilah "kampung" merujuk pada satuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola dan menyelesaikan kepentingan warganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Kampung diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kewenangan kabupaten atau kota. Selain itu, dalam Pasal 1 huruf (m) Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai Badan Permusyawaratan Desa atau Kampung (Bamuskam), yaitu suatu kelompok yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat kampung (Aedah, 2017).

Bamuskam dibentuk dan diisi oleh perwakilan yang dipilih atau diakui oleh warga setempat untuk menyampaikan usulan serta memberikan saran kepada pemerintah atau aparatur kampung dalam menjalankan pemerintahan.

Desa atau kampung di Papua merupakan unit masyarakat hukum adat terkecil yang memiliki batas wilayah serta wewenang untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai kepentingan masyarakat setempat (Muhtar et al., 2022). Kewenangan ini didasarkan pada hak asal-usul serta adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan di desa atau kampung terdiri dari beberapa unsur, yaitu aparat kampung yang mencakup kepala desa/kampung, sekretaris kampung, serta perangkat kampung lainnya seperti kepala urusan (Kaur) yang menangani berbagai bidang dalam pemerintahan kampung, serta Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Perangkat kampung merupakan bagian dari anggota masyarakat, termasuk perwakilan Lembaga Masyarakat Adat dan tokoh agama. Kampung

dipimpin oleh seorang kepala kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan langsung (Suhendi, 2020).

Masa jabatan kepala kampung berlangsung selama 9 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Struktur perangkat kampung terdiri dari sekretaris kampung (Sekam) serta aparatur kampung lainnya, seperti kepala urusan (Kaur), Badan Musyawarah Kampung (Bamus kam), dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jabatan sekretaris kampung dapat diisi oleh pegawai negeri sipil. Penyelenggaraan pemerintahan kampung tidak dijalankan secara mandiri oleh aparatur kampung, melainkan dibantu oleh Bamuskam sejak awal proses pemerintahan. Bamuskam merupakan lembaga yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahan kampung serta berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kampung. Kedudukan Bamuskam sejajar dengan aparatur kampung, sehingga tidak ada pihak yang dapat saling merendahkan atau menjatuhkan. Selain itu, kepala kampung tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan ketua maupun anggota Bamuskam, yang menegaskan independensi lembaga ini dalam sistem pemerintahan kampung.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamus kam) bukan bertujuan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pihak lain, melainkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat kampung dan mencari solusi bersama melalui musyawarah mufakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat Kampung Waruve menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya dugaan penyalahgunaan keuangan kampung dalam pelaksanaan pembangunan serta kebijakan kepala kampung yang diambil tanpa koordinasi dengan pihak lain, termasuk Bamuskam. Aset-aset kampung yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama justru dimanfaatkan secara bebas oleh kepala kampung seolah-olah merupakan milik pribadi. Selain itu, dalam berbagai kegiatan di Kampung Waruve, masyarakat harus menyewa barang milik kampung untuk digunakan. Permasalahan lain yang terjadi adalah penundaan pembayaran honor aparatur kampung, pembayaran upah pekerja dalam program pembangunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta keterlambatan pembayaran upah bagi masyarakat yang menyediakan bahan material seperti pasir, batu alam, batu bata, dan kayu dalam berbagai ukuran.

Penulis tertarik untuk meneliti peran Badan Musyawarah Kampung (Bamus kam) dalam menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat secara mendalam. Setelah rancangan program selesai, tahap selanjutnya adalah pembahasan dalam musyawarah kampung yang dihadiri oleh kepala kampung dan Bamuskam. Namun, dalam pelaksanaan program kerja di desa, terdapat permasalahan di mana Bamuskam tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengawasan terhadap program pembangunan maupun arah pembangunannya. Selain itu, berbagai program kerja lainnya sering kali tidak dijalankan sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh masyarakat Kampung Waruve.

Program pembangunan perumahan bagi masyarakat Kampung Waruve telah dibahas dalam musyawarah kampung yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, kepala kampung diduga secara diam-diam menjual sebagian bahan bangunan, seperti lebih dari 10 sak semen, tanpa sepengetahuan

masyarakat, seolah-olah merupakan barang pribadi. Selain itu, sejumlah seng atap rumah juga dijual secara rahasia. Selain penyalahgunaan bahan bangunan, aset kampung lainnya juga digunakan secara bebas oleh kepala kampung, termasuk peralatan penunjang aktivitas pemerintahan kampung, seperti kursi, meja, lemari, dan televisi. Badan Musyawarah Kampung (Bamus kam) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah, jalannya pemerintahan, serta penerapan peraturan dan keputusan yang telah disepakati bersama. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (Bamus kam) terhadap kinerja Kepala Kampung Waruwe.

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian deskriptif, yang fokusnya adalah pada masalah atau fenomena yang hadir saat penelitian dilaksanakan, sesuai dengan pendapat Nawawi mengenai jenis deskriptif sebagai tipe penelitian yang menitikberatkan pada masalah atau fenomena yang hadir pada saat penelitian dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamus kam) Terhadap Kinerja Kepala Kampung Waruwe. Kemudian Penelitian ini dilakukan pada Kampung Waruwe. Sumber data yang di dapat dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya, teknis analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Sugiyono,2016).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Strategi Sebagai Sebuah Rencana**

Dalam tahap ini, Bamus kam melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek prioritas yang perlu diawasi, termasuk penggunaan anggaran Kampung, pelaksanaan program pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. Selanjutnya, Untuk memastikan adanya keterbukaan dalam pemerintahan, Bamus kam menjalin komunikasi yang intensif dengan kepala kampung dan perangkat Kampung. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan berkala guna membahas perkembangan program desa, menyampaikan temuan pengawasan, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan kampung. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Bamus kam dan perangkat kampung, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat lebih terjamin. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampung menjadi aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdaya guna. Oleh karena itu, Bamus kam secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi mereka dalam proses pengawasan. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai metode, seperti diskusi kelompok, pertemuan warga, penyebaran informasi melalui media cetak maupun digital, serta pemanfaatan media sosial kampung. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peran Bamus kam, diharapkan mereka

dapat lebih proaktif dalam memberikan masukan serta turut serta dalam pemantauan kebijakan kampung (Warlizasusi, 2018).

Dalam implementasinya, strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bamuskam mencakup beberapa mekanisme utama. Pertama, Bamuskam mengadakan pertemuan berkala dengan perangkat kampung untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan, membahas capaian program, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kedua, dilakukan kunjungan lapangan guna memastikan bahwa setiap program yang dijalankan telah sesuai dengan perencanaan awal serta tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kunjungan ini mencakup inspeksi terhadap pembangunan infrastruktur, evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial. Selain itu, Bamuskam juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun aduan terkait penyelenggaraan pemerintahan kampung. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan warga dalam pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kampung benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Meskipun telah menerapkan berbagai strategi pengawasan, Bamuskam Kampung Waruwe masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan tenaga yang sering kali menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara lebih optimal. Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan beberapa aspek pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai peran Bamuskam juga menjadi hambatan, karena partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih tergolong rendah. Beberapa warga cenderung pasif atau tidak mengetahui mekanisme yang tersedia untuk menyampaikan keluhan atau masukan mereka terhadap kebijakan Kampung. Tantangan lain yang cukup signifikan adalah kurangnya transparansi dalam beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah kampung, yang dapat menyulitkan Bamuskam dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Beberapa kebijakan dan penggunaan anggaran desa masih kurang terbuka, sehingga mempersulit proses evaluasi yang dilakukan oleh Bamuskam. Dalam strategi ini terdapat dua karakteristik strategi yang sangat penting yaitu yang pertama, strategi direncanakan terlebih dahulu secara sadar dan sengaja mendahului berbagai tindakan yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang dibuat tersebut. Kedua, strategi dikembangkan dan diimplementasikan agar mencapai suatu tujuan (Maulani & Najibullah, 2022).

### **Strategi Sebagai Sebuah Posisi**

Badan Permusyawaratan Kampung memiliki peran krusial dalam pengawasan pemerintahan kampung. Di Kampung Waruwe, Bamuskam berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bamuskam dalam menjalankan pengawasan sebagai sebuah posisi yang kuat dalam struktur pemerintahan kampung. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Bamuskam menempatkan diri sebagai entitas yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan kampung.

Strategi yang diterapkan oleh Bamuskam dalam menempatkan diri sebagai pengawas utama dalam pemerintahan kampung didasarkan pada berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan kampung. Bamuskam memperkuat kedudukannya sebagai lembaga pengawas dengan merujuk pada regulasi dan undang-undang yang secara resmi memberikan kewenangan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kampung. Dengan dasar hukum yang kuat, Bamuskam dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam pengawasan memiliki legitimasi yang jelas serta diakui oleh semua pihak. Penegasan posisi ini juga dilakukan melalui sosialisasi kepada perangkat kampung dan masyarakat agar pemahaman terhadap peran Bamuskam semakin meningkat. Untuk menjalankan pengawasan yang efektif, Bamuskam tidak hanya bertindak sebagai pengawas yang mengkritisi kebijakan pemerintah kampung, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan dengan membangun komunikasi aktif dengan kepala kampung serta perangkat kampung. Melalui pertemuan rutin dan diskusi terbuka, Bamuskam dapat menyampaikan masukan, memperoleh informasi terkait program yang sedang berjalan, serta memastikan bahwa proses pemerintahan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara fungsi pengawasan dan kerja sama dalam membangun kampung yang lebih baik. Sebagai representasi rakyat, Bamuskam tidak hanya menjalankan pengawasan secara mandiri tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi kebijakan kampung. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi Bamuskam sebagai pengawas utama, karena dengan adanya dukungan masyarakat, pengawasan yang dilakukan menjadi lebih objektif dan berbasis pada kebutuhan nyata warga kampung. Pelibatan masyarakat ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyampaian aduan, diskusi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan akses yang lebih luas bagi warga dalam memberikan masukan terkait kebijakan kampung (Putra et al., 2023).

Strategi yang diterapkan oleh Bamuskam dalam menjalankan pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme utama yang bertujuan untuk memastikan kebijakan kampung berjalan secara transparan dan berpihak kepada masyarakat. Bamuskam secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan kampung guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan keterlibatan ini, Bamuskam dapat memberikan masukan yang konstruktif serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah melalui proses pertimbangan yang matang dan inklusif. Sebagai lembaga pengawas, Bamuskam memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada kepala kampung terkait kebijakan dan program yang dijalankan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan, Bamuskam juga berhak memberikan teguran sebagai upaya koreksi agar jalannya pemerintahan kampung tetap sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek penting dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bamuskam adalah memastikan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta implementasi program kampung. Bamuskam berupaya untuk mendorong pemerintah kampung agar lebih terbuka dalam

menyajikan laporan keuangan, realisasi program, serta hasil dari setiap kebijakan yang diambil.

Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana kampung. Dalam upayanya menempatkan diri sebagai lembaga pengawas yang strategis, Bamuskam menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi fungsi pengawasannya, di antaranya, Masih terdapat masyarakat serta perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami kewenangan dan fungsi Bamuskam dalam pengawasan. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan kampung serta menimbulkan kesalahpahaman terkait peran Bamuskam sebagai mitra sekaligus pengawas dalam pemerintahan kampung. Bamuskam sering menghadapi kendala dalam hal keterbatasan anggaran serta kurangnya pelatihan teknis bagi anggotanya. Minimnya sumber daya ini berdampak pada kurangnya efektivitas dalam melakukan pengawasan, baik dari segi pemantauan program maupun dalam penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah kampung. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan dukungan dana agar Bamuskam dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Tidak semua kebijakan yang diawasi oleh Bamuskam mendapat respons positif dari pihak pemerintah kampung. Beberapa kebijakan yang dikritisi atau diberikan masukan terkadang mendapatkan penolakan atau tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan serta menimbulkan tantangan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan kampung. Dalam hal ini strategi menunjukkan berbagai keputusan yang dipilih perusahaan untuk memposisikan organisasi perusahaan di dalam lingkungan perusahaan (Sentia Febri Juwita, Yonna Wati, 2024).

### **Strategi Sebagai Sudut Pandang**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Badan Permusyawaratan Kampung Kampung Waruve mengadopsi berbagai sudut pandang guna memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan inklusif. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan kebijakan yang diterapkan. Salah satu sudut pandang utama yang diadopsi oleh Bamuskam adalah menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemerintahan kampung. Bamuskam mendorong partisipasi aktif warga dalam mengevaluasi kebijakan kampung agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah kampung dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Bamuskam secara aktif melakukan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pengawasan, baik melalui pertemuan terbuka, forum diskusi, maupun media komunikasi lainnya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam proses pengawasan, diharapkan adanya peningkatan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan kampung serta dalam memberikan masukan terkait kebijakan yang diterapkan. Bamuskam juga menekankan keterbukaan informasi sebagai prinsip utama dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Bamuskam memahami bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung merupakan faktor kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, Bamuskam secara konsisten mendorong pemerintah kampung untuk lebih terbuka

dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan, penggunaan anggaran, serta program-program pembangunan yang sedang maupun akan dijalankan. Sebagai bagian dari upaya ini, Bamuskam mendesak pemerintah kampung untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan warga dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, seperti melalui papan pengumuman desa, media sosial kampung, atau forum dialog rutin. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kebijakan yang diterapkan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dulu. Selain menekankan keterbukaan informasi, Bamuskam juga memastikan bahwa setiap kebijakan serta penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap alokasi dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan warga kampung secara optimal dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagai bentuk pengawasan dalam aspek ini, Bamuskam mengawali proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa dengan menelaah secara kritis setiap rencana pengeluaran serta menuntut adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan dari pemerintah kampung. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, BAMUSKAM memiliki kewenangan untuk memberikan teguran serta menyampaikan rekomendasi perbaikan guna memastikan tata kelola yang lebih baik.

Untuk menerapkan strategi pengawasan berdasarkan berbagai sudut pandang tersebut, Bamuskam menerapkan beberapa mekanisme utama sebagai berikut, Bamuskam berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah kampung dalam menyampaikan aspirasi, kritik, serta saran terkait kebijakan yang diterapkan. Peran ini dijalankan melalui berbagai platform komunikasi, baik dalam bentuk rapat rutin, forum musyawarah, hingga mekanisme aduan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan mereka terhadap kebijakan atau program yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan warga. Selanjutnya Bamuskam aktif dalam mendorong pemerintah kampung untuk lebih terbuka dalam mengelola informasi terkait kebijakan dan program yang berjalan. Langkah ini dilakukan dengan meminta pemerintah kampung untuk lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi melalui berbagai media serta mengadakan pertemuan terbuka agar masyarakat dapat memahami dan turut mengawasi setiap kebijakan yang dijalankan. Kemudian Untuk mendapatkan umpan balik dari warga mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan, Bamuskam secara berkala melaksanakan survei dan diskusi kelompok guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menampung usulan atau kritik dari masyarakat. Dengan metode ini, Bamuskam dapat memperoleh data langsung dari warga yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan kampung (Ramdani et al., 2023).

Meskipun telah menerapkan berbagai strategi dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Bamuskam Kampung Waruwe masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya, di antaranya, Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dalam pemerintahan kampung. Akibatnya, partisipasi warga dalam memberikan masukan dan mengawasi kebijakan masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan desa berjalan dengan

baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun telah didorong untuk lebih terbuka, masih ada beberapa kebijakan yang sulit diawasi karena minimnya transparansi dari pihak pemerintah kampung (Fitrianti & Sari, 2024). Beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah kampung tidak selalu diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga menyulitkan Bamuskam dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara menyeluruh. Bamuskam juga menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang dalam menjalankan berbagai program pengawasan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, penyelenggaraan diskusi kelompok, serta pelaksanaan survei evaluasi kebijakan. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi anggota Bamuskam juga berdampak pada efektivitas pengawasan yang dilakukan. Strategi menunjukkan perspektif dari para pembuat keputusan strategi di dalam memandang dunianya. Strategi merupakan pemikiran yang hidup didalam benak para pembuat keputusan strategis dan seperti halnya ideologi atau budaya kemudian berusaha untuk dijadikan nilai bersama didalam suatu organisasi.

## KESIMPULAN

Strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bamuskam Kampung Waruwe mencakup berbagai tahapan mulai dari penyusunan program pengawasan, koordinasi dengan perangkat kampung, sosialisasi kepada masyarakat, hingga implementasi mekanisme pengawasan yang sistematis. Meskipun telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar pengawasan dapat lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal alokasi anggaran, peningkatan kapasitas anggota Bamuskam, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kampung. Bamuskam Kampung Waruwe Telah Menerapkan Berbagai Strategi Dalam Menempatkan diri sebagai pengawas utama dalam pemerintahan kampung, mulai dari memperkuat legitimasi hukum, menjaga komunikasi aktif dengan perangkat kampung, hingga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui berbagai mekanisme yang mencakup keterlibatan dalam perumusan kebijakan, pemberian rekomendasi dan teguran, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran kampung. Selanjutnya Bamuskam perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa mengenai peran dan fungsinya dalam pengawasan agar pemahaman mereka semakin meningkat dan partisipasi warga lebih optimal. Kemudian Pelatihan teknis mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, serta teknik pengawasan perlu diperkuat agar anggota Bamuskam lebih kompeten dalam menjalankan tugas pengawasannya. Serta Bamuskam perlu terus mendorong pemerintah kampung agar lebih terbuka dalam penyajian informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan program kampung. Bamuskam Kampung Waruwe telah mengadopsi berbagai sudut pandang dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra utama, menekankan pentingnya keterbukaan informasi, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa. Strategi ini diimplementasikan melalui mekanisme seperti menjadi penghubung antara warga dan pemerintah kampung,

mendorong keterbukaan informasi, serta mengadakan survei dan diskusi kelompok dengan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, Bamuskam masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan, kurangnya transparansi dari pemerintah kampung, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut. Selanjutnya mendorong kebijakan transparansi yang lebih kuat dengan meminta pemerintah kampung untuk menyediakan laporan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat. Serta mengupayakan peningkatan kapasitas bamuskam melalui pelatihan teknis serta alokasi anggaran yang lebih memadai guna memperkuat fungsi pengawasan yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedah, N. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3), 1–10. Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>
- Masnun, S. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 106–125.
- Maulani, F. N., & Najibullah, N. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Restoran Simpang Raya Cempaka Putih. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 2(3), 170–184. <https://doi.org/10.55182/jtp.v2i3.188>
- Muhammad idris patarai. (2017). kinerja keuangan daerah. de IA mAccA.
- Muhtar, M., Sardini, N. H., Fitriyah, F., & Tuanaya, W. (2022). Problematika Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.220>
- Nuradhwati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Putra, I. N. N. A., Susanto, H., & Sukendri, N. (2023). Posisi Strategis Desa Wisata Sekotong Barat. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 6(1), 239–247. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/12138%0Ahttps://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/download/12138/pdf>
- Ramdani, N. G., Fauziyyah, N., Fuadah, R., Rudiyono, S., Septianingrum, Y. A., Salamatussa'adah, N., & Hayani, A. (2023). Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2(1), 20. [https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2\(1\).20-31](https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2(1).20-31)

- Sentia Febri Juwita, Yonna Wati, T. M. (2024). Upaya Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Bumk Sinar Jaya (Studi Pada Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah). JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 13(2), 442–456.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabeta.
- Suhendi, D. (2020). Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung). *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 51–70. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1246>
- Warlizasusi, J. (2018). Analisis Perencanaan Strategis, Rencana Strategis dan Manajemen Strategis STAIN Curup 2015-2019. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v2i2.664>

